Tujuan hutan menyeluruh

Produksi berkelanjutan dan pembangunan

Pembiayaan hutan

Tata kelola hutan

Penilaian Deklarasi Hutan

Apakah kita berada di jalur yang benar untuk 2030?

Rangkuman Eksekutif

Oktober 2022

Forest Declaration Assessment

www.forestdeclaration.org

Penilaian Deklarasi Hutan

Apakah kita berada di jalur yang benar untuk 2030?

Rangkuman Eksekutif

Oktober 2022

Penilaian Deklarasi Hutan (sebelumnya Penilaian Kemajuan Deklarasi Hutan New York (New York Declaration on Forests, NYDF) adalah inisiatif independen yang dipimpin oleh masyarakat sipil untuk menilai kemajuan menuju tujuan-tujuan hutan menghentikan deforestasi (penggundulan hutan) dan memulihkan 350 juta hektare lahan terdegradasikan paling lambat 2030 sebagaimana yang ditetapkan oleh berbagai deklarasi internasional seperti Deklarasi Hutan New York (2014) dan Deklarasi Pemimpin Glasgow tentang Hutan dan Penggunaan Lahan (2021). Secara global, ekosistem terestrial dan pantai termasuk sabana, padang rumput, semak belukar, dan lahan basah semuanya berada dalam ancaman konversi dan degradasi. Melawan ancaman bagi semua ekosistem ini adalah amat penting untuk mencapai berbagai tujuan keanekaragaman hayati (biodiversitas) dan iklim global. Namun, penilaian tahunan terhadap kemajuan global untuk 2022 ini, berfokus secara spesifik pada ekosistem hutan. Penilaian ini dipublikasikan sebagai perangkat yang terdiri atas empat laporan yang mencakup tema yang berbeda: Tujuan-tujuan hutan yang menyeluruh, Pembangunan dan produksi yang berkelanjutan, Pembiayaan untuk hutan, dan Tata Kelola hutan.

Tujuan-tujuan konservasi di peringkat global termasuk tujuan membatasi kenaikan suhu global sampai 1,5°C, seperti yang dinyatakan di Perjanjian Paris dan mengurangi kehilangan biodiversitas seperti dinyatakan di Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Target Aichi. Mencapai hasil-hasil mitigasi global ini akan membutuhkan pengurangan drastis degradasi dan kehilangan hutan alami dan kenaikan yang sepadan dalam hal aktivitas pemulihan dan reforestasi, yang harus berusaha dicapai lewat tindakan-tindakan yang berimbang dan inklusif. Tidak kurang dari transformasi yang radikal terhadap jalur pembangunan, aliran pembiayaan, dan penegakan serta efektivitas tata kelola akan dibutuhkan untuk menggeser lintasan hutan dunia untuk mencapai tujuan-tujuan 2030 tersebut. Penilaian Deklarasi Hutan 2022 mengevaluasi kemajuan baru-baru ini terhadap berbagai tujuan 2030 tersebut dan menjawab pertanyaan: ***“Apakah kita berada di jalur yang benar?”***

Kemajuan menuju berbagai tujuan hutan 2030

Hutan bersifat mendasar untuk mengendalikan dan menstabilkan perubahan global. Memenuhi ambisi Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global tidak lebih dari 1,5°C akan mengharuskan emisi gas rumah kaca global (*global greenhouse gas, GHG)* untuk mencapai nol bersih *(net-zero)* paling lambat paruh kedua abad ini. Menghapuskan deforestasi paling lambat 2030 adalah tonggak pencapaian untuk mencapai target nol bersih 2050 tersebut. Perubahan penggunaan lahan, termasuk deforestasi dan degradasi, membentuk 10-12 persen emisi gas rumah kaca global.[a] Melindungi hutan juga jelas bermanfaat bagi manusia, biodiversitas. dan pembangunan berkelanjutan.[b]

TEMA 1:

TUJUAN HUTAN MENYELURUH

Tujuan hutan menyeluruh yang berupa: 1) mengakhiri kehilangan dan degradasi hutan alami paling lambat 2030, dan 2) memulihkan 350 juta hektare dan bentang alam (landscape) dan lahan hutan (forestland) yang terdegradasi paling lambat 2030 adalah bintang pemandu yang terhadapnya semua deforestasi, degradasi hutan, dan usaha pemulihan akan diukur dalam dasawarsa mendatang. Penilaian ini didasarkan pada laporan kemajuan Tujuan 1 dan Tujuan 5 Deklarasi Hutan New York (DHNY) sebelumnya, dan memberikan pembaruan dengan menggunakan data terbaru yang tersedia.

Menghentikan deforestasi dan degradasi hutan sesegera mungkin, dan paling lambat 2030, akan secara substansial mengurangi pelepasan emisi gas rumah kaca global ke atmosfir. Memulihkan hutan dan ekosistem lain juga akan mengembalikan jumlah signifikan karbon ke biomassa yang disimpan dan membantu kita mencapai target kolektif 2030.

Hanya delapan tahun tersisa untuk mencapai target global kembar yaitu menghentikan dan membalikkan deforestasi paling lambat 2030. Meskipun terdapat tanda-tanda yang membesarkan hati, tidak ada satu indikator global pun berada di jalur yang benar untuk mencapai berbagai target 2030 untuk menghentikan kehilangan hutan dan merestorasi 350 jutaan hektare ekosistem hutan.

Agar berada dalam jalur untuk menghentikan deforestasi paling lambat 2030, pengurangan 10% setahun dibutuhkan. Namun, laju deforestasi di seluruh dunia berkurang sedang-sedang saja, pada 2021, sebesar 6,3 persen dibandingkan dengan periode acuan 2018-2020. Di wilayah tropis lembap, kehilangan hutan primer yang tidak tergantikan hanya berkurang 3,1 persen. Di peringkat global, hutan-hutan mengalami degradasi yang bertambah pada tahun 2021, tetapi ia melambat dibandingkan periode acuan 2018-2020; jika berterusan, perlambatan ini boleh membenarkan kita untuk berada di jalur

---

[a] IPCC. (2014). *Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/; IPCC. (2019). *Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems*. https://www.ipcc.ch/srccl/.

[b] Chao, S. (2012). Masyarakat Hutan: Jumlah di seluruh dunia. https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/05/forest-peoples-numbers-across-world-final_0.pdf; World Resources Institute & Climate Focus. (2022). Tenggelam atau berenang: Bagaimana lahan masyarakat adat dan masyarakat setempat dapat membentuk atau merusak kontribusi yang ditetapkan secara nasional (hlm. 22). https://forestdeclaration.org/resources/sink-or-swim; Gibson, L., Lee, T.M., Koh, L.P., Brook, B.W., Gardner, T.A., Barlow, J., Peres, C.A., Bradshaw, C.J., Laurance, W.F., Lovejoy, T.E. & Sodhi, N.S. (2011). Hutan-hutan primer tidak tergantikan untuk menopang biodiversitas tropis. *Nature, 478(7369),* 378-381. https://doi.org/10.1038/nature10425

seharusnya untuk mencapai target 2030. Terdapat juga fluktuasi tahun-ke-tahun yang signifikan dalam metrik-metrik deforestasi dan degradasi, sehingga menyulitkan untuk mendeteksi berbagai tren selama berbagai periode waktu yang singkat. Penilaian Masa Depan akan terus memantau berbagai proses ini untuk mengonfirmasi kemajuan terbatas yang dideteksi pada 2021.

Asia Tropis merupakan satu-satunya kawasan yang sekarang berada di jalur yang benar untuk menghentikan deforestasi paling lambat 2030 (**Gambar ES1**). Meskipun laju deforestasi di Afrika dan Amerika Latin Tropis berkurang pada 2021 dibandingkan periode acuan 2018-2020, pengurangan tersebut masih tidak memadai untuk mencapai tujuan 2030. Setiap tahun yang berlalu tanpa kemajuan yang memadai menjadikan makin sulit untuk mencapai tujuan perlindungan hutan global—dan meningkatkan pengurangan tahunan yang diperlukan pada tahun-tahun mendatang.

Kemajuan menonjol dalam usaha aforestasi (pembentukan hutan) dan reforestasi (penghutanan kembali) telah menghasilkan berbagai wilayah hutan seluas Peru, dengan perolehan netto tutupan hutan (forest cover) di 36 negara. Namun, kehilangan secara keseluruhan melebihi perolehan di periode yang sama, sehingga menyebabkan kehilangan netto sebesar 100 juta hektare secara global. Perlu diperhatikan bahwa peroleh tutupan hutan, lewat aktivitas reforestasi dan aforestasi, tidak mengganti kehilangan hutan dalam hal layanan (manfaat) ekosistem, biodiversitas, atau penyimpanan karbon. Oleh karena itu, usaha prioritas tertinggi harus diarahkan lebih dahulu ke perlindungan hutan-hutan primer dari kehilangan.

Gambar ES1. Laju deforestasi global berdasarkan kawasan selama periode 2010-2021, dan jalur untuk mencapai target nol bruto 2030 dari periode acuan 2018-2020, dalam jutaan hektare

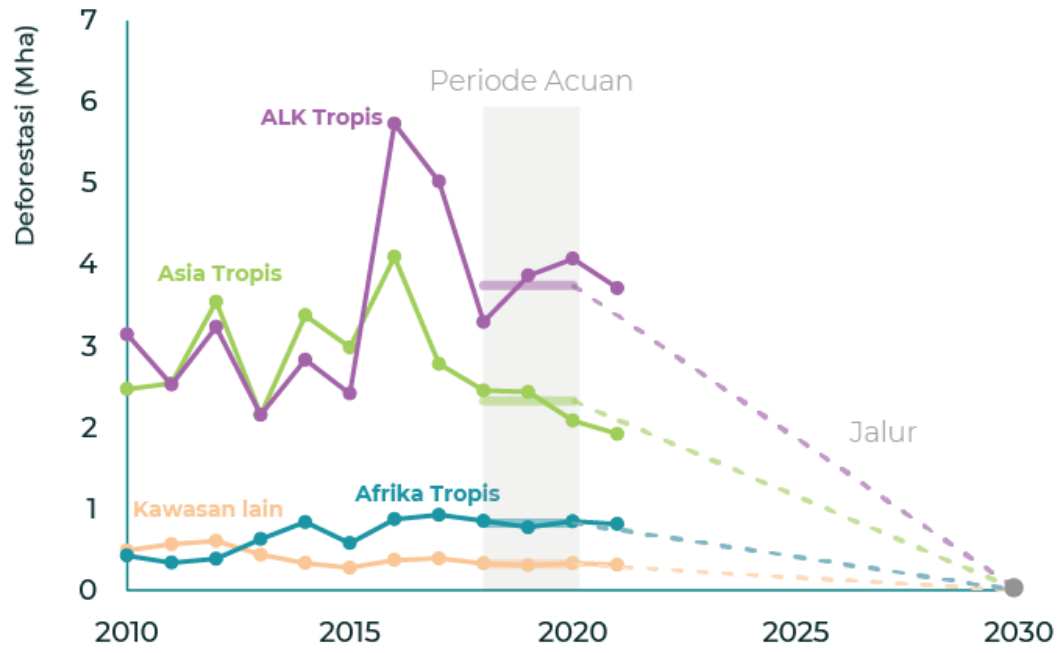

Sumber: Gambar berdasarkan analisis asli untuk laporan ini menggunakan data dari Hansen et al. 2013.
Catatan: Mha = juta hektare; ALK = Amerika Latin dan Karibia. Data yang merujuk ke kawasan lain digunakan di sini untuk referensi, untuk menyoroti bahwa sebagian besar deforestasi hanya terjadi di dua kawasan global. Data sebelum dan sesudah tahun 2015 tidak dapat dibandingkan secara langsung, karena metodologi untuk mendeteksi kehilangan tutupan pohon telah diperbaiki dan dapat menghasilkan perkiraan kehilangan yang lebih tinggi untuk beberapa tahun terakhir dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun hal ini tidak mempengaruhi penilaian kemajuan sejak tahun 2020.

Produksi berkelanjutan dan pembangunan

Permintaan global terhadap komoditas global seperti makanan dan kayu, dan komoditas yang ditambang seperti bahan bakar dari fosil dan bahan tambang, terus mendorong perluasan agrikultur, industri ekstraktif, dan penggunaan lahan lain ke dalam hutan. Deforestasi sering dimungkinkan oleh pendirian infrastruktur, yang sengaja atau tidak sengaja membuka akses ke hutan-hutan. Risiko hutan yang paling parah berasal dari apa yang disebut sebagai megaproyek, yang mengombinasikan berbagai jenis transportasi dan infrastruktur energi, bersama dengan berbagai lokasi produksi komoditas agrikultur, ekstraksi sumber daya alam, dan urbanisasi berencana. Proyek-proyek seperti itu sedang berlangsung atau direncanakan dalam semua kawasan hutan utama.

TEMA 2:

PRODUKSI BERKELANJUTAN DAN PEMBANGUNAN

Penilaian produksi berkelanjutan dan pembangunan mengeksplorasi berbagai aktivitas dan sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap dan mendorong deforestasi dan degradasi hutan, termasuk agrikultur, industri ekstraktif, infrastruktur, dan aspek-aspek lain pembangunan ekonomi. Laporan ini didasarkan pada laporan Penilaian Kemajuan Tujuan 2 (komoditas agrikultur), Tujuan 3 (infrastruktur dan industri ekstraktif), dan Tujuan 4 (mata pencaharian berkelanjutan) DHNY. Tinjauan ini mendukung target korporat untuk mengakhiri deforestasi dari produksi komoditas agrikultur paling lambat pada 2025, tonggak pencapaian yang sangat penting untuk membatasi kenaikan suhu sampai di bawah 1,5°C.

Hutan terancam oleh tidak hanya pasar global, tetapi juga oleh permintaan yang bertambah karena populasi di wilayah-wilayah hutan dan pusat-pusat urban. Miliaran orang, terutama Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat (MA dan MS) mengandalkan hutan untuk sumber penghidupan mereka atau melakukan berbagai aktivitas perdagangan berskala kecil yang menopang mata pencaharian mereka. Berbagai aktivitas ini juga dapat menyebabkan deforestasi atau degradasi permanen jika tekanan permintaan lebih cepat daripada laju regenerasi hutan.

Berbagai Penemuan

Kita tidak berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan sektor swasta untuk menghilangkan deforestasi dari rantai pasokan agrikultur paling lambat 2025. Kehilangan tutupan pohon yang didorong oleh komoditas menurun sebesar 6 persen pada 2021 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2018-2020), tetapi laju deforestasi masih tetap lebih tinggi daripada tahun apa pun sebelum 2016 dan jauh dari lintasan (20% pengurangan per tahun) yang dibutuhkan untuk mencapai target 2025 (**Gambar ES2**).

Hampir semua pemerintah negara telah mengadopsi berbagai tujuan hutan yang ambisius dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang mengindikasikan dukungan yang luas terhadap tujuan mencapai pembangunan dan produksi yang berkelanjutan. Belasan negara berkembang juga telah mengembangkan berbagai strategi hutan dalam konteks REDD+ (mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan), meletakkan landasan bagi berbagai reformasi penting—dan, dalam berbagai kasus, mendorong berbagai perubahan kebijakan yang penting. Namun, dalam beberapa kasus,

program-program ini belum menghasilkan pengurangan deforestasi dan hanya beberapa negara telah menerima pembayaran untuk pengurangan emisi hutan.

Di sebagian besar negara, pemerintah masih harus membuat berbagai reformasi sektoral tegas yang dibutuhkan untuk melindungi hutan. Terdapat transparansi yang terbatas tentang bagaimana para pembuat kebijakan mengintegrasikan berbagai tujuan hutan ke dalam pembuatan keputusan mereka, dan bagaimana mereka berusaha menghindari dan memitigasi berbagai risiko hutan di berbagai sektor ekonomi. Berbagai kebijakan penggunaan lahan - seperti insentif fiskal, penilaian dampak sosial dan lingkungan, dan regulasi wilayah yang dilindungi - sering gagal mengintegrasikan kepedulian hutan, dirancang dengan kelemahan atau ditegakkan dengan lemah. Bahkan pemerintah yang telah mengadopsi agenda "pertumbuhan hijau" masih berjuang untuk berinvestasi dalam pertumbuhan ekonomi yang diselaraskan dengan berbagai tujuan hutan.

Gambar ES2. Deforestasi yang didorong oleh komoditas, jutaan hektare, dan jalur untuk mencapai tujuan 2025

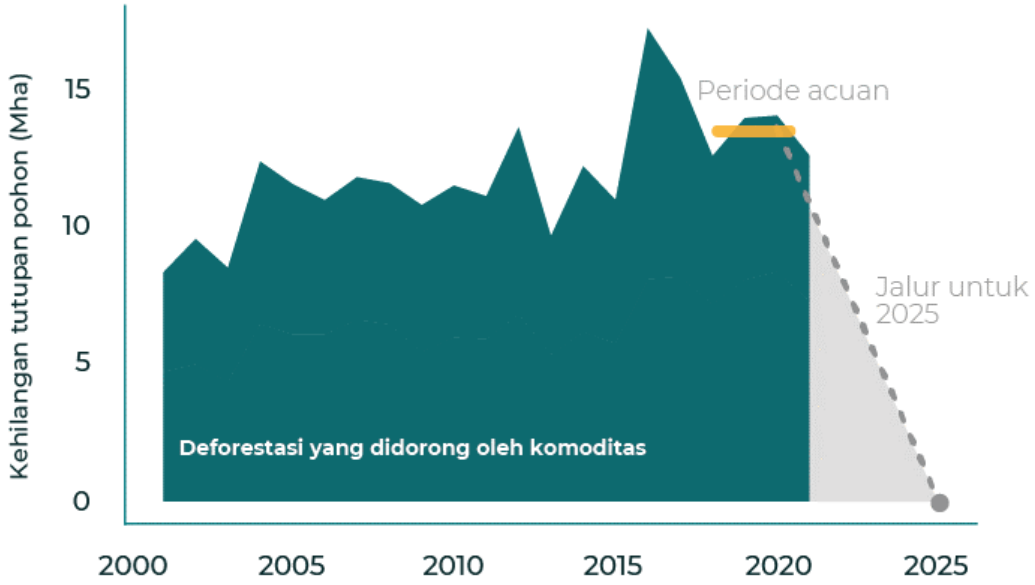

Sumber: GFW, Hansen et al. 2013, dan Curtis et al. 2018, dan proyeksi jalur Climate Focus dari tahun 2021 hingga 2025 berdasarkan target deforestasi bruto nol dari produksi komoditas pada tahun 2025
Catatan: Deforestasi yang didorong oleh komoditas mencakup konversi ke penggunaan non-hutan terutama untuk pertanian komersial, tetapi juga infrastruktur pertambangan atau energi.

Hal yang membesarkan hati adalah bahwa berbagai intervensi pembangunan seperti kehutanan komunitas *(community forestry)*, pembayaran bagi berbagai skema layanan lingkungan, dan berbagai layanan perluasan bagi petani dapat menangani pengurangan kemiskinan, deforestasi, dan degradasi hutan. Namun, terdapat hanya beberapa contoh program pengurangan kemiskinan yang dipimpin pemerintah yang memprioritaskan dampak hutan dan diterapkan sesuai kebutuhan. Sebuah analisis terhadap 23 negara menemukan bahwa sebagian besar memiliki skema kehutanan kolektif atau komunitas, tetapi hanya beberapa memberikan penguasaan lahan *(land tenure)* yang matang atau mempromosikan pembangunan ekonomi.

Demikian juga, sektor agrikultur belum membuat kemajuan yang memadai dalam mengurangi deforestasi dari produksi komoditas agrikultur. Sejak laporan Penilaian Kemajuan DHNY pertama pada 2016, kita baru melihat kemajuan yang sedikit dalam mengeluarkan deforestasi dari rantai pasokan

(Tujuan 2 DHNY) dan potensi transformatif dari tindakan sukarela perusahaan belum diwujudkan. Dewasa ini, hanya seperempat perusahaan global besar di sektor tersebut yang telah mengumumkan kebijakan yang jelas, komprehensif, dan ambisius untuk menghapus deforestasi dari rantai pasokan mereka; di antara berbagai perusahaan tersebut hanya beberapa yang telah membuat kemajuan signifikan dalam penerapannya. Kurang dari 20 persen dari berbagai perusahaan yang mengungkapkan ke Proyek Pengungkapan Karbon (Carbon Disclosure Project, CDP) melaporkan kepatuhan yang hampir lengkap terhadap berbagai komitmen deforestasi nol mereka.

Tindakan korporat di sektor ekstraktif juga tetap terbatas. Untuk menanggapi permintaan investor, sebagian besar perusahaan pertambangan kini telah mengadopsi suatu bentuk tanggung jawab sosial korporat atau pendekatan tata kelola, sosial dan lingkungan, tetapi kedua kerangka ini jarang mencakup fokus yang jelas terhadap hutan. Laju dalam menerapkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab oleh berbagai perusahaan terkemuka telah melambat sejak 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya beberapa perusahaan yang telah mengadopsi standar keberlanjutan sektor pertambangan secara sukarela yang mengharuskan mereka menangani berbagai dampak hutan yang bersifat langsung, tidak langsung, dan kumulatif. Sektor pertambangan baru-baru ini membuat langkah positif dengan mengadopsi berbagai kebijakan dan standar yang menangani berbagai dampak hutan masih tertinggal secara signifikan di belakang sektor agrikultur.

MA dan MS terletak di garis depan environmentalisme akar rumput, meskipun terdapat berbagai risiko signifikan yang mereka hadapi. MA dan MS sering bekerja bersama dengan organisasi masyarakat sipil, koalisi petani kecil, dan jaringan perempuan untuk memerangi berbagai ancaman terhadap hutan dari proyek pembangunan, perluasan ekstraktif atau agrikultur. Aktor-aktor ini menggunakan berbagai bentuk perlawanan sosial, tetapi keberhasilannya terbatas—hanya 1 dari 10 mobilisasi dari bawah ke atas melawan proyek yang berkonflik sosial dan bersifat destruktif terhadap lingkungan yang berhasil dalam menghentikan proyek target mereka. Namun, keberhasilan ini memakan korban: Sebanyak 200 pembela lingkungan dan lahan dibunuh pada 2021, dan sektor pertambangan dan ekstraktif secara konsisten diperingkatkan sebagai salah satu yang mematikan bagi para pembela.

Rekomendasi

Untuk memastikan bahwa 2025 dan 2030 tidak berlalu seperti 2020—dengan kemajuan yang terbatas menuju berbagai tujuan hutan —pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil harus berkolaborasi dengan mempercepat tindakan hutan, yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas.

Para Mitra Penilaian Deklarasi Hutan mendorong para pendukung Deklarasi Pemimpin Glasgow, serta para pembuat ikrar yang lain, untuk memastikan transparansi penuh dalam penerapan berbagai ikrar, sehingga kemajuan dapat ditelusuri dan para pembuat ikrar dijadikan memiliki tanggung jawab. Para pembuat ikrar harus menerapkan berbagai tonggak kemajuan sementara yang jelas dan memberikan laporan yang dapat diakses publik.

Para aktor pemerintah, swasta, dan akar rumput harus memprioritaskan kolaborasi untuk mendongkrak kekuatan dan peran terkait untuk mencapai target 2025 untuk deforestasi yang didorong oleh komoditas. Ketika lokasi geografi dan rantai pasokan tertentu telah mencapai pengurangan, pihak yang berjasa biasanya adalah mandat pemerintah, tindakan perusahaan, dan inisiatif masyarakat sipil dan akar rumput. Semua aktor harus mempercepat penerapan program yurisdiksi dan bentang alam

multifungsi yang mengambil pendekatan integratif, inklusif, dan kolaboratif untuk menangani berbagai dampak dan risiko hutan sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah berbagai negara harus secara cermat mempertimbangkan apakah tindakan sukarela merupakan landasan yang layak untuk mencapai berbagai tujuan hutan 2030 tersebut, atau bagaimana peran tindakan wajib, pengungkapan, dan akuntabilitas harus ditingkatkan. Terlepas dari keberhasilan luar biasa beberapa inisiatif yang dipimpin pihak swasta—terutama Moratorium Kedelai Amazon, yang telah menyebabkan pengurangan deforestasi substansial yang berlangsung selamanya—tindakan sukarelawan saja belum secara memadai menggeser lintasan kehilangan hutan.

- Untuk memenuhi target dan ikrar sukarela mereka sendiri, berbagai pemerintah hendaknya mengadopsi dan menegakkan mandat yang lebih kuat untuk manajemen keberlanjutan dan perlindungan hutan. Intervensi dapat mencakup regulasi uji kelayakan yang bersifat mengikat dan pengungkapan wajib, moratorium, bertambahnya regulasi terhadap wilayah-wilayah yang dilindungi, dan pengakuan dan penghormatan bagi wilayah Adat (Indigenous territories) termasuk Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Terinformasi (Free, Prior and Informed Consent, FPIC) wajib, Mandat-mandat ini harus matang dan berbasis sains, mencakup semua komoditas berisiko hutan, deforestasi legal dan ilegal dan menangani hak asasi manusia dan hak-hak MA dan MS.
- Peran sangat penting berbagai perusahaan perdagangan komoditas global, yang memperoleh sumber dan memperdagangkan berbagai komoditas hutan dengan volume yang tidak sebanding, harus diakui dan ditingkatkan untuk mencapai kemajuan yang konkret pada skala yang dibutuhkan. Para pemerintah harus menerapkan regulasi dan legislasi yang menargetkan para aktor ini, dilengkapi dengan ketentuan yang jelas bagi dan dari berbagai lembaga pembiayaan.
- Para pemerintah harus menerapkan lensa hutan (forest lens) terhadap intervensi yang dirancang untuk meningkatkan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan; "menghijaukan" intervensi kemiskinan dapat meningkatkan efektivitasnya dengan memelihara dan meningkatkan kontribusi berbagai layanan ekosistem hutan terhadap mata pencaharian di wilayah terpencil.
- Di sektor ekstraktif, infrastruktur, dan agrikultur, berbagai regulasi harus memandatkan bahwa risiko hutan yang diidentifikasikan bagi proyek pembangunan apa pun harus dikelola dengan menerapkan hierarki mitigasi, dengan langkah pertama - penghindaran - diterapkan sebisa mungkin, dengan mempertimbangkan prioritas lain bagi pembangunan berkelanjutan. Para pemerintah juga harus menegakkan zona belum siap ("no-go" zones) secara tegas bagi industri ekstraktif dan infrastruktur dalam ekosistem hutan yang bernilai tinggi.
- Untuk industri ekstraktif, para pemerintah harus juga memperketatkan proses regulasi untuk pencarian (prospecting), eksplorasi, dan pertambangan akitiviti pertambangan. Penilaian dampak sosial dan lingkungan hendaknya diwajibkan untuk dilaksanakan lebih awal dalam siklus pertambangan dan untuk menilai dampak proyek yang bersifat kumulatif dan tidak langsung.
- Di semua sektor, para pemerintah juga harus memberdayakan masyarakat sipil, petani kecil, dan, khususnya, MA dan MS yang secara tradisional merupakan konstituensi terkuat bagi hutan. Para pemerintah perlu memastikan partisipasi yang bermakna dalam proses pembuatan keputusan, rancangan, dan penerapan oleh para pemegang hak yang

dipengaruhi menyangkut lahan hutan adat dan mata pencaharian mereka yang menjamin hak mereka terhadap FPIC, serta partisipasi berbagai organisasi yang mengadvokasi hak-hak alam.

Perusahaan-perusahaan perlu secara urgen menambah cakupan dan keketatan tindakan korporat, baik sukarela atau dimandatkan. Perusahaan-perusahaan yang ingin terus memimpin di baris depan menuju berbagai tujuan hutan 2025 dan 2030 harus melakukan advokasi pada tingkat lokal, nasional, dan internasional terhadap pendekatan holistik untuk menangani deforestasi, yang di dalamnya tindakan korporat dimungkinkan dan didukung oleh kerangka kebijakan dan legislatif, standar perdagangan, dan instrumen pembiayaan serta struktur insentif.

- Perusahaan-perusahaan agrikultur harus berusaha mengikuti panduan terbaik yang ada untuk mengeluarkan deforestasi dari rantai pasokan mereka dan harus mengadopsi praktik-praktik terbaik yang ditetapkan oleh standar-standar keberlanjutan.
- Badan-badan sektoral seperti himpunan komoditas dan perdagangan harus memperluas usaha-usaha mereka untuk menyertakan pasar domestik dan usaha kecil dan menengah ke dalam gerakan rantai pasokan nol deforestasi dan nol konversi untuk menjangkau pangsa yang amat penting dalam cakupan pasar (market coverage) untuk semua komoditas berisiko hutan.
- Perusahaan-perusahaan ekstraktif, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan sumber dari perusahaan-perusahaan tersebut, harus mengadopsi kebijakan dan komitmen biodiversitas yang secara eksplisit menyatakan bahwa dampak hutan dalam operasi perusahaan di dan di luar lokasi tambang, dan di keseluruhan perusahaan, harus ditangani menggunakan hierarki mitigasi. Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian harus menanamkan mekanisme dan proses yang diperlukan dalam operasi standar mereka untuk mewujudkan berbagai komitmen ini, termasuk sistem pemantauan dan pelaporan.
- Skema-skema keberlanjutan sektor pertambangan harus mewajibkan operator lokasi dan pembeli hilir untuk menilai dan mengelola tidak hanya dampak langsung dari ekstraksi terhadap hutan , tetapi juga dampak kumulatif dan tidak langsung.
- Perusahaan-perusahaan di rantai pasokan ekstraktif juga harus mempertimbangkan berbagai kesempatan untuk melaksanakan aktivitas restorasi dan konservasi hutan lewat lensa solusi berbasis alam, untuk memitigasi risiko bisnis, mencapai target biodiversitas dan iklim perusahaan, dan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan yang dipengaruhi.

Pembiayaan hutan

Pencapaian berbagai tujuan hutan internasional mengharuskan investasi publik dan swasta yang substansial untuk menangani berbagai pendorong deforestasi, dan untuk mengelola dan memulihkan keberlanjutan hutan. Memperbaiki dampak lingkungan dari sistem industri dan agrikultur kita membutuhkan berbagai perubahan mendalam terhadap sistem ekonomi dan hukum. Tanpa mekanisme penegakan dan mekanisme kompensasi, hutan bagi pengguna akan lebih bermanfaat jika digunduli daripada dibiarkan tegak – terutama untuk jangka pendek.

Pencapaian berbagai tujuan hutan mengharuskan lebih banyak pembiayaan diperuntukkan bagi aktivitas hutan, dan pembiayaan yang ada sekarang harus digeser dari aktivitas yang berbahaya, malah menuju tindakan yang berkelanjutan.

THEME 3

PEMBIAYAAN HUTAN

Penilaian terhadap pembiayaan hutan dan tujuan hutan memberikan pembaruan tentang data yang tersedia dan berbagai kebijakan baru-baru ini untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor hutan, dan pembaruan tentang penilaian terhadap peran pembiayaan publik dan swasta, dan pasar karbon bagi pembiayaan hutan. Penilaian ini menilai sejauh mana kemajuan tahun lalu mendekati tujuan-tujuan hutan global 2030; sejauh mana pembiayaan yang sekarang memadai untuk mencapai tujuan-tujuan ini, dan di mana kesenjangan (gap) masih ada. Penilaian ini juga mengeksplorasi berbagai wilayah baru terkait pembiayaan hutan, termasuk mekanisme tata kelola sektor publik, mekanisme pembiayaan langsung bagi MA dan MS, peran pasar karbon sukarela..

Berbagai Penemuan

Pembiayaan untuk hutan tidak berada di jalur yang benar untuk memenuhi berbagai tujuan global untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi paling lambat 2030. Akan membutuhkan biaya sampai 460 miliar dolar AS (sekitar 6.900 triliun rupiah) untuk melindungi, memulihkan, dan meningkatkan hutan pada skala global. Sekarang ini, pembiayaan mitigasi domestik dan internasional untuk hutan rata-rata 2,3 miliar dolar AS (sekitar 34,5 triliun rupiah) per tahun – kurang dari 1 persen dari total yang dibutuhkan. Sebagai perbandingan, pembiayaan total untuk iklim, dari sumber publik dan swasta, mencapai 632 miliar dolar AS (sekitar 9.480 triliun rupiah) pada 2019-2020.

Pendanaan bagi hutan akan perlu ditingkatkan sampai 200 kali untuk mencapai berbagai tujuan 2030. Pendanaan ini tidak harus datang hanya dari donasi filantropik, atau bantuan pembangunan sektor publik—beragam mekanisme pembiayaan dapat mendukung tujuan hutan jika dirancang dengan benar, termasuk anggaran domestik dan kebijakan fiskal, investasi swasta, pembiayaan yang dipadukan dan dihapuskan risikonya *(de-risked)*, hibah atau pinjaman, dukungan pembangunan kapasitas dan kesiapan, dan pembayaran berbasis hasil.

Ikrar-ikrar pembiayaan yang dibuat pada 2021 memperlihatkan kenaikan substansial dalam ambisi untuk mencapai tujuan hutan 2030. Jika dipenuhi dengan lengkap, ikrar-ikrar itu akan melipatempatkan pembiayaan tahunan untuk hutan dari 2021-2025 menjadi 9,5 miliar dolar AS (sekitar 140 triliun rupiah). Namun, pendanaan bagi hutan akan tetap perlu ditingkatkan sampai 50 kali untuk memenuhi kebutuhan investasi. Setelah satu tahun sejak berbagai ikrar ini dinyatakan, belum mungkin untuk menilai kemajuannya, karena sebagian besar belum diungkapkan ke publik dalam hal usaha-usaha

penerapannya. Namun, data yang tersedia belum memperlihatkan kenaikan dalam pendanaan yang berkaitan dengan berbagai ikrar yang dinyatakan dalam Konferensi Para Pihak 26 (Conference of Parties 26, COP26) pada November 2021.

Dari 2010-2020, para pemerintah mengomitmenkan pendanaan publik domestik dan internasional sebesar 25,3 miliar dolar (sekitar 375 trililun rupiah) untuk melindungi dan melestarikan hutan—pembiayaan yang dikomitmenkan dengan tujuan hutan yang sudah dinyatakan, atau dalam strategi REDD+. Aliran pembiayaan telah bertambah sejak 2010, dengan periode pertumbuhan signifikan antara 2016-2019. Namun, pada 2020, aliran pembiayaan merosot hampir separuhnya, mungkin karena prioritas anggaran negara-negara yang berubah karena pandemi COVID-19. Bahkan pada puncaknya, pembiayaan untuk mendukung tujuan hutan kalah besar dibandingkan dengan aliran pembiayaan "kelabu" (berpotensi membahayakan) domestik dan internasional untuk sektor agrikultur dan hutan. Dari 2010-2020, investasi kelabu oleh sektor publik berjumlah total setidaknya 257 miliar AS (sekitar 3.860 triliun rupiah) dari pembiayaan domestik dan 13 miliar dolar AS (sekitar 195 triliun rupiah) dari pembiayaan internasional.

MA dan MS yang merupakan pelayan dan pengurus paling efektif terhadap wilayah hutan mereka, menerima pendanaan yang jauh lebih sedikit daripada perkiraan kebutuhan pembiayaan mereka untuk mengamankan hak penguasaan dan melestarikan ekosistem hutan. Hanya 1,4 persen dari pembiayaan iklim publik total pada 2019-2020 ditargetkan untuk kebutuhan MA dan MS, dan hanya 3 persen dari kebutuhan pembiayaan untuk reformasi penguasaan lahan transformasional dipenuhi setiap tahun.

Para aktor sektor swasta—perusahaan, lembaga, dan badan filantropi—belum mendongkrak kekuatan signifikan mereka untuk mengarahkan pembangunan dan produksi komoditas ke lintasan berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan hutan.. Sebagian besar lembaga pembiayaan masih gagal menjadikan perlindungan deforestasi sebagai target investasi mereka. Hampir dua pertiga dari 150 pemain pembiayaan besar yang paling berhubungan dengan deforestasi belum memiliki satu pun kebijakan deforestasi yang mencakup investasi resiko hutan mereka, sehingga menyebabkan investasi 2,6 miliar dolar AS (sekitar 39 triliun rupiah) di bidang komoditas berisiko deforestasi tinggi tanpa penjagaan yang memadai.

Permintaan atas kredit karbon (izin untuk mengeluarkan emisi karbon dioksida) berbasis alam telah tumbuh secara signifikan, terutama didorong oleh kepentingan berbagai perusahaan. Volume kredit karbon yang diperdagangkan di pasar karbon sukarela tumbuh sebesar tumbuh sebesar 89 persen pada 2021, dengan 45% dari semua kredit yang dikeluarkan berasal dari proyek penggunaan lahan dan kehutanan. Pada pihak lain, hanya 10 persen dari kredit karbon yang dikeluarkan di pasar kepatuhan *(compliance market)* pada 2021 berasal dari skema yang memungkinkan penggunaan kredit karbon dari hutan. Harga rata-rata kredit karbon hutan pada 2021 adalah antara 4,7 dan 15 dolar AS (antara 73.500 dan 225.000 rupiah) per ton CO_2, jauh di bawah harga dibutuhkan untuk memenuhi target Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global sampai 1.5 °C. Secara keseluruhan, kontribusi pembiayaan pasar karbon masih kecil dibandingkan dengan berbagai sumber pembiayaan hijau lainnya.

Rekomendasi

Terlepas dari adanya label harga *(price tag)* untuk melindungi dan memulihkan hutan pada skala global—sampai 460 miliar dolar AS (sekitar 6.900 triliun rupiah) per tahun—ini adalah investasi yang kita mesti capai. Mencapai tujuan hutan 2030 adalah amat penting bagi dunia yang dapat dihuni sesuai

dengan Perjanjian Paris. Pemerintah, lembaga pembiayaan, perusahaan, dan lembaga filantropi harus meningkatkan dan menyesuaikan pembelanjaan dan investasi mereka dengan tujuan pemulihan dan pemeliharaan hutan.

Mitra Penilaian Deklarasi Hutan menyerukan agar pemerintah, perusahaan, dan lembaga keuangan menggunakan semua perkakas yang ada untuk secara substansial meningkatkan investasi mereka di hutan, sembari juga menggeser pembiayaan dari aktivitas-aktivitas yang membahayakan.

Mitra Penilaian tersebut mendesak pihak-pihak yang membuat komitmen pembiayaan hutan—termasuk para penyokong Deklarasi Pemimpin Glasgow—untuk berkolaborasi dengan berbagai komunitas terdampak untuk merancang ikrar mereka dan memasangkan ikrar mereka dengan tonggak pencapaian *(milestone)* sementara yang transparan dan dibatasi waktu dan pelaporan publik tentang pencairan dana, efektivitas pendanaan, dan penyelarasan aliran pembiayaan dengan tujuan hutan. Para pembuat komitmen harus memerinci bagian dari pembiayaan manakah yang bersifat tambahan dibandingkan dengan pendanaan yang sudah ada dan direncanakan dan harus menjelaskan bagaimana, kapan, dan di mana pembiayaan ini akan dibelanjakan. Mekanisme evaluasi harus diterapkan untuk memungkinkan para donor dan komunitas untuk menilai berbagai dampak pembiayaan yang dicairkan dan memungkinkan penyesuaian yang dibutuhkan. Proses yang inklusif dan transparan amat penting untuk memahami bagaimana pembiayaan yang sudah diikrarkan dibandingkan dengan kebutuhan dan proses ini dapat membantu untuk memandu dan meningkatkan dampak investasi masa depan, serta membantu menjadikan para aktor melaporkan komitmen mereka. Manajemen dan tata kelola pembiayaan bagi hutan harus dikembangkan dalam kemitraan dengan organisasi penerapan lokal untuk memastikan bahwa pembiayaan yang dicairkan mencapai tujuannya.

Semua aktor pembiayaan, termasuk pemerintah, lembaga pembiayaan, perusahaan, dan lembaga filantropi, harus melakukan semua usaha untuk mendukung keterlibatan MA dan MS dalam pembuatan keputusan pembiayaan dan hutan. Aktor publik dan privat/swasta harus mempermudah aliran pembiayaan ke MA dan MS untuk lebih memungkinkan keduanya untuk melaksanakan aktivitas konservasi dan perlindungan hutan. Pemerintah, lembaga multilateral, dan yayasan swasta harus memprioritaskan pembentukan mekanisme pembiayaan baru dan langsung untuk aktivitas-aktivitas ini dan harus merancang bersama mekanisme ini dengan kelompok-kelompok MA dan MS. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara donor, lembaga nonpemerintah, MA dan MS dapat membantu untuk membangun kepercayaan dan memandu intervensi yang paling tepat. Pihak pembiaya publik dan swasta harus juga mengurangi beban administratif dan teknis dan membangun kapasitas bagi kelompok-kelompok MA dan MS untuk menerima dan mengelola dana secara langsung. Jika perantara diperlukan, organisasi yang dipercayai oleh MA dan MS harus diprioritaskan.

Aktor-aktor sektor publik harus melakukan langkah yang konkret dan berdampak luas untuk menerapkan dan memperluas komitmen pembiayaan mereka dan menyelaraskan kebijakan fiskal dan pembiayaan mereka dengan tujuan hutan, termasuk:

- Memasukkan berbagai dampak dan risiko hutan ke dalam kerangka penganggaran publik. Para pemerintah harus menilai dampak potensial keputusan pembiayaan dan fiskal terhadap hutan dan pembiayaan langsung terhadap berbagai aktivitas yang memiliki risiko paling kecil dan paling menguntungkan bagi hutan. Tindakan perlindungan harus diterapkan jika dibutuhkan.
- Menggunakan setiap kesempatan untuk mengalihkan subsidi agrikultur yang dapat berbahaya dan insentif lain (domestik dan internasional) yang mendorong deforestasi dan degradasi hutan. Para pemerintah harus bertindak untuk mengindentifikasi subsidi mana

yang menyebabkan dampak hutan yang merugikan dan, semaksimal mungkin sambil memastikan hasil yang adil dan merata, mengalihkan dan mengatur ulang tujuan berbagai subsidi ini, baik dengan menjadikan dukungan pembiayaan bergantung pada pencapaian tujuan lingkungan, atau dengan menyalurkan pembiayaan secara langsung ke dalam program insentif bebas deforestasi.

- Menggunakan perkakas pembiayaan campuran untuk mendongkrak pembiayaan sektor swasta untuk perlindungan hutan. Menerapkan kebijakan dan instrumen yang dapat membantu menghilangkan risiko dalam investasi swasta untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi pembiayaan swasta.

Lembaga pembiayaan dan perusahaan di berbagai sektor harus mengenali dan bertindak berdasarkan risiko bisnis inheren yang ada pada deforestasi dan degradasi hutan dan menerapkan tindakan dan kebijakan untuk mengatasi risiko ini, termasuk:

- Mengembangkan pemahaman penuh terhadap keterpaparan dan kontribusi perusahaan atau lembaga tersebut terhadap dampak dan risiko terkait hutan dan iklim (dalam jangka pendek, menengah, dan panjang).
- Memasukkan proses untuk menilai risiko terkait hutan dan iklim ke dalam proses manajemen risiko yang ada. Hal ini termasuk proses untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko.
- Beranjak dari pengungkapan sukarela ke wajib terhadap risiko terkait hutan dan mencapai kemajuan berdasarkan ikrar untuk meningkatkan transparansi dan jadikan investor dapat mempertimbangkan ulang keputusan alokasi modal mereka.
- Menerapkan standar dan kebijakan yang secara aktif mempromosikan pinjaman dan investasi hijau ke bisnis sektor lahan yang berorientasi konservasi hutan.
- Memprioritaskan investasi yang diselaraskan dan bersinergi dengan tujuan hutan, dengan menerapkan hierarki mitigasi untuk semua keputusan investasi. Membatasi volume pembiayaan swasta yang mengalir ke berbagai aktivitas yang memiliki dampak merusak hutan.

Ketika para aktor sektor swasta memilih untuk berinvestasi dalam pemulihan dan konservasi alam, mereka harus memastikan bahwa mereka mendukung intervensi berintegritas tinggi dan berkualitas tinggi sesuai dengan target berbasis sains dan hierarki mitigasi. Hal ini dapat mencakup berbagai opsi berbasis pasar, seperti partisipasi dalam pasar karbon dengan kredit berbasis lahan dan hutan, atau opsi berbasis nonpasar seperti dukungan terhadap penerapan aktivitas keberlanjutan berskala bentang alam atau yurisdiksional. Berbagai tindakan untuk mencapai tujuan ini mencakup:

- Berinvestasi dalam pembiayaan bentang alam (landscape finance) untuk berbagai aktivitas perlindungan hutan yang secara holistik menangani pendorong hutan deforestasi, konversi, dan degradasi lahan, baik yang berbasis pasar dan nonpasar. Salah satu contohnya adalah dukungan platform multi-pemangku kepentingan yang dapat mempromosikan pembentukan konstituensi, perencanaan strategis, pemetaan, dan pengembangan proyek.
- Apabila menggunakan kredit karbon berbasis hutan untuk mencapai tujuan mitigasi klima dalam perniagaan, hanya gunakan kredit karbon berbasis hutan untuk mengompensasi emisi residual, setelah terlebih dahulu memprioritaskan reduksi emisi dalam operasi internal aktor tersebut. Selain itu, pertimbangkan untuk berinvestasi dalam kredit karbon berbasis

hutan sebagai bagian dari strategi untuk mencapai dekarbonisasi masyarakat di luar rantai nilai perusahaan sendiri.

- Dalam membuat keputusan pembelian, memprioritaskan 1) mengkreditkan standar yang memenuhi kriteria integritas lingkungan dan sosial, 2) kredit kualitas tinggi dari program-program REDD 3) berbagai proyek yang berasal dari berbagai program dan proyek berkualitas tinggi program REDD++ yurisdiksional berkualitas tinggi dan 4) kredit dari berbagai program dan proyek berkualitas tinggi yang mengurangi ancaman terhadap tegakan hutan tropis yang ada.
- Mengembangkan, memperbesar, dan mengadopsi kerangka tata kelola yang membentuk aturan bagi penggunaan publik dan swasta terhadap, dan klaim tentang, kredit karbon.

Tata kelola hutan

Tata kelola hutan yang efektif menghasilkan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas yang bersifat kondusif terhadap partisipasi bermakna semua kelompok, menjadikan pemerintah bertanggung jawab, dan mempromosikan tindakan terhadap pencapaian tujuan bersama, seperti perlindungan hutan dan peningkatan penguasaan lahan dan akses terhadap berbagai sumber daya alam.

Bukti memperlihatkan bahwa tata kelola hutan yang lemah menghasilkan dampak negatif, tidak hanya terhadap bentang alam hutan dan ekosistemnya, tetapi juga terhadap masyarakat, dan, secara khusus, pihak-pihak yang paling bergantung pada lahan hutan, termasuk MA dan MS, orang-orang miskin, dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya. Ketika negara-negara berhasil mengurangi deforestasi, sukses ini berasal dari sistem tata kelola yang matang.

TEMA 4

TATA KELOLA HUTAN

Penilaian ini mencakup berbagai sistem tata kelola hutan dan dukungannya terhadap tujuan menghentikan dan membalikkan kehilangan hutan dan degradasi lahan paling lambat 2030. Berbagai unsur tata kelola hutan yang dinilai mencakup kerangka hukum, kebijakan, dan kelembagaan tentang perlindungan dan manajemen berkelanjutan terhadap hutan; tindakan dari sisi permintaan dan keterlibatan internasional; penegakan hukum; keamanan penguasaan hutan, perlindungan hak, dan pemberdayaan MA dan MS; serta transparansi, partisipasi publik, dan akses ke keadilan. Laporan ini dibuat berdasarkan berbagai laporan Penilaian Kemajuan DHNY ini tentang Tujuan 10 DHNY.

Di dunia tempat berbagai ikrar sukarela makin digunakan untuk mengomunikasikan maksud untuk bekerja secara kolektif menuju tujuan hutan 2030, tata kelola hutan yang efektif tetap merupakan landasan untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut diselaraskan menuju tujuan bersama.

Berbagai Penemuan

Dengan hanya delapan tahun tersisa untuk mencapai berbagai tujuan 2030 tersebut, tata kelola hutan dan lahan hutan masih belum kuat untuk membatasi deforestasi dan degradasi sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut. Instrumen kebijakan dan hukum yang matang seperti moratorium, kapasitas penegakan yang diperkuat, kebijakan konservasi yang cerdas, dan akuntabilitas dan transparansi yang ditingkatkan bersifat efektif dalam melindungi hutan—seperti yang terbukti lewat pengurangan menonjol deforestasi pada berbagai periode sejak 2004 ketika kedua perkakas ini diterapkan di Indonesia, Ghana, Pantai Gading, Gabon, Guyana, dan Brasil. Namun, sebagian dari pencapaian ini telah mengalami pembalikan—terutama di Brasil—atau mengalami risiko pembalikan ketika negara-negara tidak meneruskan secara bertahap atau memundurkan perolehan kebijakan lewat berbagai amandemen yang baru-baru ini atau yang diusulkan.

Di beberapa negara, reformasi dan inisiatif baru telah memperkuat kerangka kebijakan dan hukum yang menata kelola penggunaan lahan dan hutan. Yurisdiksi (wilayah hukum) seperti Republik Kongo dan Amerika Serikat baru-baru ini telah mengembangkan undang-undang dan kebijakan untuk melindungi dan secara berkelanjutan mengelola hutan mereka secara lebih efektif. Yurisdiksi lain, seperti Uni Eropa

(EU), Australia, Vietnam, dan China memperluas regulasi sisi permintaan *(demand-side)* mereka dengan mengembangkan undang-undang yang menangani impor komoditas berisiko hutan dan meningkatkan keterlacakan *(traceability)* dalam sektor hutan. Namun, sebagian besar proposal ini tidak memiliki detail yang memadai, berada dalam tahap awal pengembangan, atau masih harus diterapkan pada skala yang memadai untuk mengendalikan deforestasi sesuai dengan tujuan 2030.

Berbagai pendekatan yang lebih inklusif terhadap pengembangan, penerapan, dan penegakan kebijakan telah diterapkan oleh makin banyak negara, sehingga mencerminkan peningkatan kapasitas dan keahlian dalam masyarakat sipil dan pengakuan pemerintah terhadap nilai perlindungan hutan. Hal ini telah menghasilkan peningkatan dalam kebijakan dan perundang-undangan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan sektor swasta, sebagai contoh, di Republik Kongo, Ghana, dan Kamerun.

Penegakan hukum juga makin baik di beberapa negara hutan tropis, sebagai contoh, menyumbang kepada pengurangan ekspor kayu ilegal dari Republik Demokratik Rakyat Lao, dan berkontribusi terhadap berkurangnya deforestasi di Indonesia. Namun, terdapat juga pelemahan penegakan dan kesenjangan dalam berbagai kerangka hukum yang ada di beberapa negara, sehingga mencegah penegakan yang efektif di negara-negara lain. Lebih lanjut, korupsi menyebar luas di banyak wilayah hutan, mempermudah ilegalitas di hutan dan perdagangan kayu ilegal.

Akhirnya, ketidakamanan penguasaan *(tenure)* terjadi di banyak negara, dengan setidaknya 50 persen dari lahan dan wilayah yang dipegang oleh MA dan MS masih tidak diakui secara hukum. Reformasi di negara-negara Cekungan Kongo seperti Republik Kongo dan Republik Demokrasi Kongo (RDK) telah memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak MA dan MS. Namun, beberapa negara hutan tropis utama lain juga telah memperlemah perlindungan terhadap hak-hak MA dan MS lewat perubahan regulatif dan legislatif, atau belum mempercepat penerapan kebijakan dan perundang-undangan relevan untuk pengakuan terhadap hutan, lahan, dan perairan milik MA dan MS, dan hasilnya MA dan MS masih menghadapi berbagai pelanggaran atas hak dan wilayah mereka, serta kekerasan dan peminggiran (marginalisasi).

Rekomendasi

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah urgen untuk memperkuat tata kelola hutan, termasuk:

- Menangani berbagai kelemahan, tumpang tindih, dan ambiguitas dalam kerangka hukum hutan; mengklarifikasikan mandat kelembagaan, regulasi, dan undang-undang yang bertumpang tindih dan tidak jelas; merampingkan kerangka hukum di sektor hutan dan non-hutan dan meningkatkan kapasitas otoritas penegakan untuk memahami hukum.
- Menghentikan dan membalikkan pelemahan kerangka hukum dan kapasitas lembaga. Para pemerintah harus secara cermat menilai implikasi jangka banjang dari kemunduran yang ada sekarang bagi pembangunan berkelanjutan dan hutan. Hal ini mencakup amendemen dan pengenalan perundang-undangan baru-baru ini yang merusak perlindungan hutan dan reformasi yang memperlemah perlindungan lingkungan dan sosial karena munculnya COVID-19.
- Mengamankan hak penguasaan lahan MA dan MS dengan mengembangkan dan menerapkan perundang-undangan yang jelas dan koheren (saling bertalian) yang secara formal mengakui dan melindungi hak-hak ini.

- Menerapkan proses inklusif bagi tata kelola hutan, termasuk lewat menanamkan partisipasi dan inklusi berbagai komunitas yang bergantung pada hutan dalam pembuatan keputusan hutan ke dalam kerangka hukum, memastikan bahwa MA dan MS dimintai konsultasinya dan telah menyetujui keputusan tentang lahan hutan mereka lewat proses FPIC. Secara lebih luas, memastikan partisipasi aktor bukan negara dalam penerapan dan pembuatan hukum dan kebijakan, perencanaan penggunaan lahan; penegakan hukum, dan pemantauan hutan.
- Menangani berbagai kelemahan regulasi dan memastikan penerapan yang tepat terhadap penilaian dampak sosial dan lingkungan (environmental and social impact assessments, ESIA) dan terhadap legislasi tentang wilayah yang dilindungi. Penerapan yang tepat terhadap ESIA termasuk mempertimbangkan semua dampak negatif langsung, tidak langsung, dan kumulatif terhadap hutan dan masyarakat yang bergantung kepadanya dan memprioritaskan penghindaran dari dampak tersebut sesuai dengan hierarki mitigasi.
- Meningkatkan pengecekan dan penyeimbangan (checks and balances) untuk memerangi korupsi di sektor lahan dan hutan. Hal ini mengharuskan, sebagai contoh, pembatasan kebijakan pejabat pemerintah dalam menyetujui konsesi; mengadopsi berbagai aturan untuk menghindari konflik kepentingan; pelaksanaan penerapan matang terhadap sistem penjaminan legalitas hukum dan persyaratan uji kelayakan; dan memastikan kepatuhan terhadap atau penguatan perundang-undangan transparansi.
- Memperkuat penegakan dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk badan-badan penegakan, memperkuat kerja sama internasional, dan memberdayakan komunitas dan masyarakat sipil dalam bidang pemantauan.
- Memperkuat perencanaan penggunaan lahan, termasuk analisis perencanaan ruang berbasis bukti dan proses untuk alokasi konsesi ESIA, selaras dengan tujuan hutan.

.

TENTANG

Penilaian Deklarasi Hutan (*Forest Declaration Assessment*) adalah proses berkelanjutan dan kolaboratif yang dicapai secara kolektif oleh organisasi masyarakat sipil dan peneliti, yang dikenal sebagai Mitra Penilai Deklarasi Hutan. Sebelumnya Penilaian Kemajuan NYDF, Penilaian Deklarasi Hutan sejak 2015 menerbitkan pembaruan tahunan tentang kemajuan menuju tujuan hutan global. Semua temuan penilaian menjalani proses peer review ketat yang dilakukan oleh para ahli di seluruh dunia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Penilaian Deklarasi Hutan, silakan kunjungi www.forestdeclaration.org/about/assessment.

Laporan ini milik domain publik. Pengguna dipersilakan untuk mengunduh, menyimpan, atau mendistribusikan laporan ini secara elektronik atau pun dengan format lain. Salinan digital laporan ini, bersama dengan penilaian kemajuan sebelumnya, tersedia di www.forestdeclaration.org.

KUTIPAN

Silakan menggunakan kutipan berikut:

> Forest Declaration Assessment Partners. (2022). Penilaian Deklarasi Hutan: Apakah kita berada di jalur yang benar untuk 2030? Rangkuman Eksekutif. Climate Focus (koordinator dan editor). Dapat diakses di www.forestdeclaration.org.

UCAPAN TERIMA KASIH

Proyek ini didukung oleh Climate and Land Use Alliance (CLUA) dan Forest Declaration Platform. Dukungan dengan hubungan media diberikan oleh Burnness. Komunikasi digital dikoordinasikan oleh Sara Cottle. Terjemahan disediakan oleh VVH business translations. Para penulis berterima kasih kepada banyak individu dan organisasi yang menyediakan waktu dan keahlian mereka, dalam berbagai cara, untuk pengembangan dan peningkatan karya ini.

Forest Declaration Platform
Transforming commitments into action

UNDP

Accountability Framework
CDP
DISCLOSURE INSIGHT ACTION
CHATHAM HOUSE
CLIMATE FOCUS
CIFOR
CONSERVATION INTERNATIONAL
Environmental Defense Fund
FAUNA & FLORA INTERNATIONAL
FOREST TRENDS
Forest Foundation Philippines
Let's grow together.
Global Canopy
GLOBAL FOREST WATCH
Global Restoration Initiative
IGES
Institute for Global Environmental Strategies
imaflora
LEVIN SOURCES
Nature 4Climate
RIGHTS + RESOURCES
THE SUSTAINABILITY CONSORTIUM
Wildlife Conservation Society
YIAKU LAIKIPIAK TRUST
DEMOCRACY | WOMEN RIGHTS | BIODIVERSITY
ZSL LET'S WORK FOR WILDLIFE
SPOTT
WWF
Forest Declaration Assessment
www.forestdeclaration.org